

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Aji, A. Y., Laba, I. N. 2018. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara". *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 2 (2):27-42.
- Asshiddiqie, J. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagja, Rahmat & Dayanto, 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Depok : Rajawali Press.
- Faiz, P. M., Winata, M. R. 2019. Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik. *Jurnal Konstitusi*, 16 (3):532-558.
- Faradz, Haedah. 2018. "Peranan Dana Perimbangan Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Banyumas". *Authentica: Privat Law Journal*, 1 (1):1-13.
- Hadjon, P. M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzani, A. I. 2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 3 (1):136-142.
- Harjiyatni, F.R dan Suswoto. 2017. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 24 (4):601-624.
- Huda, N. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N dan Nazriyah. 2017. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Cetakan IV. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Insiyah, S. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Calon DPD Dari Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018*, Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kusumaningrum, Hesti. 2020. "Application of Prudential Principles in Registration of Granting Mortgage Right (APHT)". *Authentica: Privat Law Journal*, 2 (2): 121-145.
- Martitah, Hidayat, A., & Nugroho, A. W. 2018. *PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH Unnes.
- Marzuki, Masnur. 2008. "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya". *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*. 15 (1): 81-100.
- Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setara Institute. 2016. *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Simanjuntak, E. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudrajat, T. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, B. 2016. Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*. 13 (1): 171-190.
- Sulistyo, T. *et.al.* 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Siswoyo, R.A. 2019. "Effectiveness of Notary Ethical Sanctions Against Violations of the Ethical Code by Notaries in Banyumas District". *Authentica: Privat Law Journal*. 2 (2):146-166.
- Tjandra, W. R. 2013. Pergeseran Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Atas Penetapan Parpol Peserta Pemilu : Kajian Putusan PTTUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT. *Jurnal Yudisial*, 6 (2): 159-172.
- Utomo, N. A. 2015. Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(4):825-848.

Wasti, Ryan Mutiara. "Fungsi Presentasi Dewan Perwakilan Daerah". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 47 (4): 439-458.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

